

IMPLEMENTASI KURIKULUM 2004 DAN RESISTENSI BUDAYA BIROKRATIK

Oleh:
Ahmad Yani*

ABSTRAK

Kurikulum 2004 dikelola dengan basis sekolah atau desentralistik. Sekolah diperbolehkan memperdalam, memperkaya, dan memodifikasi muatan kurikulum tetapi tidak mengurangi isi kurikulum yang berlaku secara nasional. Masalah utama sebagaimana telah dijelaskan adalah kegamangan guru dalam melaksanakan tugas sebagai akibat kurangnya pemahaman tentang Kurikulum 2004 dan juga terjebak oleh budaya birokratik. Dilihat dari dua hambatan di atas, jalan yang dianggap efektif untuk mengembalikan keberanian guru antara lain: (a) memberi penguatan kepada guru melalui pendidikan atau pelatihan untuk memberi pemahaman yang benar tentang kurikulum 2004 dan cara-cara pengembangannya, (b) di setiap sekolah dan dinas pendidikan kota/kabupaten harus memiliki komunitas pengembang kurikulum, dan (3) memberi penghargaan kepada guru yang melahirkan inovasi-inovasi dan atau apresiasi yang unggul dari upayanya mengembangkan kurikulum 2004.

Kata Kunci: Kurikulum, resistensi, birokratik

LATAR BELAKANG MASALAH

Penerapan Kurikulum 2004 yang dikembangkan dari “hulu” Kurikulum Berbasis Kompetensi dan atau Kurikulum Teknologis relatif lebih banyak mengundang kontroversi dari berbagai kalangan. Misalnya dari para ahli kurikulum, di awal sosialisasi mereka banyak mengecam penamaan kurikulum dengan label Kurikulum Berbasis Kompetensi dengan alasan terlalu “gegabah” dan mereduksi makna holistik sistem pendidikan. Para praktisi pendidikan, terutama guru, menentang karena seringnya bergonti-ganti kurikulum. Sedangkan dari pihak masyarakat banyak mengkritik dari sudut politis “ganti menteri ganti kurikulum”. Orang tua murid bahkan merasa was-was jangan-jangan anaknya menjadi korban “uji coba” kurikulum dan berakibat gagal masuk perguruan tinggi negeri yang terbaik (terjadi pada orang tua murid yang anaknya sekolah pada SMA *pilot project* Kurikulum 2004, katakanlah di SMA 2 Bandung). Semua itu sebagai bukti adanya masalah yang krusial dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia.

Mengapa demikian?, kita runut dari belakang. Gaya birokratik yang telah tertanamkan sejak Jaman Orde Baru telah sangat mencengkram kebebasan apresiasi guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik. Bayangkan, selama tiga dekade sejak diberlakukannya kurikulum 1975, 1984, dan 1994 guru secara rinci didikte dalam melaksanakan tugasnya. Katakanlah dalam merumuskan Tujuan Instruksional atau sejenisnya harus persis dengan Garis-Garis Besar Program Pengajaran (GBPP).

* Drs. Ahmad Yani, M.Si adalah dosen Jurusan Pendidikan Geografi sedang menempuh program S3 Pengembangan Kurikulum UPI.

Standarisasi materi ajar yang berlaku di seluruh nusantara tidak lagi memperhatikan kondisi dan tuntutan kebutuhan belajar (*learning need*) masyarakatnya, bahkan rentang lingkungan sekolah yang berbeda di desa terpencil sampai ke kota besar metropolitan disamaratakan. Guru pun tidak dapat melakukan inovasi dengan baik karena selalu dibayang-bayangi oleh standar soal EBTANAS. Dalam arti materi yang diajarkan selalu mengejar penguasaan tanya jawab-soal Ujian Nasional demi mengejar nilai EBTANAS. Akibatnya sadar atau tidak sadar, maka terciptalah suatu mental guru yang penakut, yaitu takut salah. Mereka berusaha memahami dengan sebaik-baiknya semua petunjuk dari pusat dengan tujuan agar tidak salah melaksanakan tugas di sekolah. Inilah yang dimaksud oleh penulis sebagai resistensi budaya birokratik yang menguasai jiwa raga guru di seantero nusantara.

Selama sosialisasi Kurikulum 2004, yaitu dari tahun 2003 sampai dengan 2005 barangkali merupakan sosialisasi yang banyak direspon oleh guru dengan animo yang paling tinggi. Ruang seminar yang bertema Kurikulum 2004 selalu dipenuhi oleh guru-guru, bahkan dengan modal sendiri mereka sengaja berkunjung ke Pusat Kurikulum untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan Kurikulum 2004. Sepengetahuan penulis mereka meminta kepastian bagaimana pelaksanaan kurikulum 2004 yang sebenarnya.

Ketika kurikulum 2004 digulirkan dengan perangkat yang berbeda dan memberi keleluasaan guru untuk melakukan apresiasi dan inovasi pembelajaran, mereka banyak yang ragu dan kebingungan. Keraguannya terletak pada saat menentukan rincian kompetensi dari standar nasional, cara penilaian kompetensi, membedakan antara kompetensi yang bersifat kognitif dan aspek sikap, dan pada saat merumuskan silabus serta skenario pembelajaran. Apa yang menjadi kebingungan bukan terletak pada bagaimana cara mengerjakan tugas itu tetapi justru mereka bingung karena merasa “diambangkan” oleh pihak pemerintah pusat dengan tidak ada petunjuk yang lebih rinci.

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang patut ditanyakan adalah:

1. Bagaimana karakteristik kurikulum 2004 yang berlaku saat ini?
2. Mengapa kurikulum 2004 cenderung memberi keleluasaan guru dalam pengembangannya?
3. Upaya apakah agar para guru berani mengembangkan kurikulum dengan baik sesuai dengan harapan kurikulum 2004?

TINJAUAN PUSTAKA

Terdapat empat konsep kurikulum yang diperkenalkan para ahli kurikulum yaitu model konsep kurikulum subjek akademik, humanistik, rekonstruksi sosial, dan teknologis (Sukmadinata, 2002). Kurikulum subjek akademis bersumber dari pendidikan klasik (perennialisme dan esensialisme) yang berorientasi pada masa lalu. Asumsi kurikulum subjek akademik adalah bahwa semua ilmu pengetahuan dan nilai-nilai telah ditemukan para pemikir masa lalu. Fungsi pendidikan hanya memelihara dan mewariskan hasil-hasil budaya masa lalu tersebut kepada generasi berikutnya. Kurikulum jenis ini lebih mengutamakan isi pendidikan dan siswa harus berusaha menguasai ilmu sebanyak-banyaknya. Kurikulum 1984 yang pernah berlaku di Indonesia cenderung mengikuti konsep kurikulum model konsep ini.

Kurikulum humanistik dikembangkan oleh para ahli pendidikan humanistik. Kurikulum ini dikembangkan berdasarkan konsep aliran pendidikan pribadi (*personalized*

education), yaitu Jhon Dewey (*Progressive Education*). Aliran ini lebih memberikan tempat utama kepada siswa. Asumsi yang dikembangkan dalam kurikulum humanistik adalah bahwa siswa mempunyai potensi, punya kemampuan, dan kekuatan untuk berkembang. Para pengembang humanis juga berpegang pada konsep Gestalt, bahwa individu atau anak merupakan satu kesatuan yang menyeluruh. Kurikulum humanistik menuntut hubungan emosional yang baik antara guru dan murid. Guru selain harus mampu menciptakan hubungan yang hangat dengan murid, juga mampu menjadi sumber. Pengembangan kurikulum humanistik di Indonesia lebih banyak dimanfaatkan untuk pendidikan pra sekolah (TK) dan anak kelas 1 – 3 SD.

Kurikulum rekonstruksi sosial lebih memusatkan perhatian pada problem-problem yang dihadapinya dalam masyarakat. Kurikulum ini bersumber pada aliran pendidikan interaksional, yang berpandangan bahwa pendidikan bukan upaya sendiri, melainkan kegiatan bersama, interaksi dan bekerja sama. Kerja sama atau interaksi bukan hanya terjadi antara siswa dengan guru, tetapi juga antara siswa dengan siswa, siswa dengan orang-orang di lingkungannya, dan dengan sumber belajar lainnya. Melalui interaksi dan kerja sama ini siswa berusaha memecahkan problem-problem yang dihadapinya dalam masyarakat menuju pembentukan masyarakat yang lebih baik.

Selanjutnya, kurikulum teknologis adalah konsep kurikulum yang menekankan pada kompetensi. Pengembangan dan penggunaan alat dan media pengajaran bukan hanya sebagai alat bantu tetapi bersatu dengan program pengajaran dan ditujukan pada penguasaan kompetensi tertentu. Pengembangan kurikulum ini membutuhkan kerjasama dengan para penyusun program dan penerbit media elektronik dan media cetak. Kurikulum 2004 dikembangkan dari kurikulum teknologis ini, sehingga setiap kemampuan siswa akan diukur berdasarkan unit-unit kompetensi.

Dari konsep di atas, pengembangannya dapat menggunakan pendekatan sentralistik atau desentralistik. Kelebihan pendekatan sentralistik adalah mudahnya dicapai konsensus, sangat baik dalam memelihara budaya nasional, sangat membantu dalam perluasan kesempatan belajar, dan mudah dalam mengadakan inovasi. Adapun diantara kekurangannya adalah kurang mampu beradaptasi dengan kebutuhan lokal (daerah). Sedangkan pendekatan desentralistik mempunyai kelebihan dalam hal beradaptasi dengan kebutuhan dan situasi sosial-budaya lokal; namun memiliki kelemahan terutama kesulitan untuk mencapai konsensus dari berbagai keragaman kebutuhan daerah.

Kurikulum yang pernah berlaku yakni kurikulum 1975, 1984, dan 1994 merupakan contoh kurikulum yang dikembangkan dengan pendekatan sentralistik. Landasan yuridis yang digunakan dalam penyusunan kurikulum itu antara lain adalah UU Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan berbagai Peraturan Pemerintah yang terkait, yaitu PP nomor 27-29 tentang Pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Prosedur dalam pengembangan kurikulum sentralistik bersifat administratif, yaitu dari atas ke bawah (*top-down*). Pejabat pendidikan di tingkat pusat membentuk suatu panitia pengarah yang bertugas merencanakan, memberi pengarahan tentang garis besar kebijakan, dan menyiapkan rumusan falsafah dan tujuan umum pendidikan yang dijadikan acuan dalam pengembangan kurikulum. Pada tahap selanjutnya, ditunjuk kelompok-kelompok kerja sesuai dengan keperluan. Anggota-anggota kelompok kerja umumnya terdiri atas staf pengajar dan spesialis-spesialis kurikulum. Tugasnya adalah menyusun tujuan-tujuan khusus, konten dan kegiatan

belajar. Hasil pekerjaannya direvisi oleh panitia pengarah. Bila dipandang perlu, maka diadakan uji coba untuk meneliti kelayakan pelaksanaannya. Hal ini dikerjakan oleh suatu komisi lain yang ditunjuk oleh panitia pengarah. Apabila pekerjaan itu telah selesai diserahkan kembali kepada panitia pengarah untuk ditelaah sekali lagi kemudian diimplementasikan.

Seiring dengan perubahan politik nasional yaitu tentang otonomi daerah, pengembangan kurikulum 2004 tidak dapat sepenuhnya dengan pendekatan sentralistik hal ini didasarkan pada Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah: Pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia; UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No.25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Ketetapan MPR RI dan kedua Undang-Undang tersebut dijadikan landasan yuridis pelaksanaan desentralisasi pendidikan yang berimplikasi terhadap pendekatan pengembangan kurikulum dan pengelolaan atau manajemen sekolah. Dalam perencanaan pendidikan secara desentralistik dilakukan analisis kebutuhan berdasarkan pendekatan kewilayahan yang bermula dari bawah dan melibatkan peran serta masyarakat semaksimal mungkin. Pengembangan kurikulum dengan pendekatan desentralistik dikaitkan dengan kebutuhan pembangunan daerah setempat.

Undang Undang nomor 22 tahun 1999 yang pada intinya memberikan kewenangan yang luas kepada daerah untuk menjalankan dan mengurus rumah tangganya masing-masing, termasuk dalam sektor pendidikan menjadi wilayah yang harus dikompromikan pada saat pengembangan kurikulum. Satu sisi pengembangan kurikulum harus diarahkan kepada pembentukan manusia Indonesia yang berwawasan nasional, tetapi pada sisi yang lain harus senantiasa berkomitmen memelihara budaya lokal yang unggul. Karena itu dalam batas-batas tertentu, kurikulum 2004 mengikuti standar kompetensi yang bersifat nasional sementara dalam implementasinya berusaha dilaksanakan secara desentralistik. Disinilah letak masalah yang berdampak pada kebingungan masyarakat sebagai akibat "belum terbiasa" dengan model pengembangan kurikulum desentralistik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yang bersumber dari berbagai pustaka yaitu buku referensi, jurnal ilmiah, artikel koran, buku referensi, dan berita lain baik dari media cetak maupun elektronik. Sebagai bahan informasi didukung pula oleh data observasi langsung ke sejumlah lokasi pilot project kurikulum 2004 diantaranya ke SMA 2 Bandung, ke Pusat Kurikulum Jakarta, dan mengikuti sejumlah seminar baik dalam skala wilayah maupun nasional.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Kurikulum 2004

Kurikulum 2004 yang lahir dari pangkal berbasis kompetensi (KBK) pada dasarnya berisikan kompetensi atau kemampuan dasar yang harus dicapai oleh peserta

didik sebagai indikator pencapaian hasil belajar yang telah ditetapkan. Kompetensi itu sendiri dapat diartikan sebagai kemampuan melaksanakan tugas yang diperoleh, melalui pendidikan dan latihan yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kompetensi dikembangkan untuk memberikan dasar keterampilan dan keahlian bertahan hidup dalam perubahan, pertentangan, ketidakmenentuan, ketidakpastian, dan kerumitan-kerumitan dalam kehidupan. Kompetensi dasar ini terdiri dari:

- (1) kompetensi akademik, yaitu pengetahuan dan keterampilan dalam mengatasi tantangan dan persoalan hidup
- (2) kompetensi okupasional, yaitu kompetensi yang berkenan dengan kesiapan untuk beradaptasi terhadap dunia kerja;
- (3) kompetensi kultural, yaitu kemampuan menempatkan diri sebaik-baiknya dalam sistem budaya dan tata nilai masyarakat yang pluralistik;
- (4) kompetensi temporal, yaitu kemampuan peserta didik dalam menjalani kehidupannya, serta mampu memanfaatkan ketiga kemampuan dasar yang telah dimiliki sesuai dengan perkembangan jaman;

Secara umum Kurikulum 2004 menitikberatkan pada (a) pencapaian target kompetensi (*attainment targets*) daripada penguasaan materi, (b) mengakomodasikan keragaman kebutuhan dan sumber daya pendidikan yang tersedia, (c) memberikan kebebasan yang lebih luas kepada pelaksana pendidikan di lapangan untuk mengembangkan dan melaksanakan program-program pembelajaran sesuai dengan kebutuhan. Kemajemukan sumber daya pendidikan di Indonesia sangat memungkinkan munculnya keragaman pemahaman dan penafsiran terhadap standar nasional yang dampaknya akan mempengaruhi pencapaian standar nasional kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Dengan demikian Kurikulum 2004 memiliki kelebihan yaitu dapat dijadikan acuan secara nasional dalam mengembangkan mata pelajaran di masing-masing daerah, memudahkan daerah untuk mengembangkan mata pelajaran sesuai dengan lingkungannya, memberi peluang kepada sekolah untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan potensinya, memudahkan guru dalam menentukan materi pembelajaran, dan meningkatkan kreativitas guru dalam proses belajar, dan memudahkan sistem evaluasi.

Sukmadinata (2002) merinci kompetensi teknis dan kompetensi profesional memiliki aspek-aspek yang sama, yaitu perilaku atau performance, pengetahuan, keterampilan, proses, penyesuaian diri sikap dan nilai. Perbedaannya terletak pada kompleksitas dan tingkat kesukarannya. Menurut Boediono (2002), Kurikulum Berbasis Kompetensi terdiri atas empat komponen utama, yaitu (i) Kurikulum dan Hasil Belajar; (ii) Penilaian Berbasis Kelas, (iii) Kegiatan Belajar Mengajar, dan (iv) Pengelolaan Kurikulum Berbasis Sekolah. Keempat komponen utama KBK ini merupakan suatu kesatuan yang menggambarkan seluruh rangkaian masa persekolahan. Sehingga jelaslah bahwa Kurikulum Berbasis Kompetensi merupakan suatu yang mengembangkan pembelajaran dan program pengajaran sesuai dengan tuntutan kehidupan, keadaan sekolah, dan kebutuhan siswa.

Perlu diingat bahwa Kurikulum 2004 pada dasarnya tidak lagi menonjolkan isi atau materi pelajaran, akan tetapi menempatkan pengalaman belajar untuk membentuk kemampuan sebagai arah pengembangan kurikulum, maka dalam implementasinya kurikulum lebih menekankan kepada proses belajar. Pengelolaan pembelajaran tidak lagi didesain untuk memberikan sejumlah informasi kepada siswa untuk dicatat dan dihapal,

akan tetapi pengelolaan pembelajaran didesai bagaimana siswa dapat menemukan informasi yang dibutuhkan. Dalam konteks “menemukan“ itulah pembelajaran dapat membekali siswa sejumlah kemampuan atau kompetensi, misalnya kompetensi berpikir, kompetensi bekerja keras, kompetensi mengakses informasi, mencari data dan lain sebagainya. Jadi dengan demikian , implementasi kurikulum berbasis kompetensi, benar-benar menempatkan siswa sebagai subjek belajar atau yang kita kenal dengan *student oriented*. (Lemlit UPI, 2004).

B. Kurikulum 2004 dan Keleluasaan Guru dalam Pengembangannya

Sebagaimana telah disinggung pada pembahasan terdahulu bahwa karakteristik kurikulum 2004 dikelola dengan basis sekolah. Di sinilah kunci adanya pelimpahan kewenangan kepada sekolah dan guru untuk mengembangkan kurikulum 2004. Wujud atau komponen yang diserahkan sepenuhnya kepada guru ada dalam perumusan silabus atau perencanaan pembelajaran serta skenario pembelajaran yang berisi formulasi pendekatan pembelajaran untuk melaksanakan kurikulum di depan kelas.

Keleluasaan guru dalam pengembangan kurikulum 2004 bersumber dari pemberlakuan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS). Dalam buku panduannya, MPMBS diartikan sebagai model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah, memberikan keluwesan-keluwesannya kepada sekolah, dan mendorong partisipasi secara langsung warga sekolah (guru, siswa, kepala sekolah, karyawan) dan masyarakat (orang tua siswa, tokoh masyarakat, ilmuwan, pengusaha, dan lain-lain) untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan otonomi yang lebih besar tersebut, diharapkan sekolah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengelola sekolahnya, sehingga sekolah lebih mandiri. Dengan memandiriannya, sekolah lebih berdaya dalam mengembangkan program-program yang, tentu saja, lebih sesuai dengan dengan kebutuhan dan potensi yang dimilikinya.

Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Indonesia diprioritaskan untuk peningkatan mutu pendidikan. Artinya MBS yang aslinya untuk meningkatkan semua kinerja sekolah yaitu meningkatkan efektivitas, kualitas/mutu, efisiensi, inovasi, relevansi, dan pemerataan serta akses pendidikan belum akan dilaksanakan semuanya. Dalam rancangannya, MBS di Indonesia hanya difokuskan kepada peningkatan mutu pendidikan, karena itu konsep yang lahir adalah Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS).

Namun demikian mekanismenya tidak jauh berbeda dengan MBS secara keseluruhan target. Dalam buku panduan, MPMBS diartikan sebagai model manajemen yang memberrikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong partisipasi langsung warga sekolah (guru, siswa, kepala sekolah, karyawan) dan masyarakat (orang tua siswa, tokoh masyarakat, ilmuwan, penguasaha, dll) untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam MPMBS, fungsi-fungsi yang didesentralisasikan ke sekolah dalam manajemen berbasis sekolah ini meliputi sembilan unsur manajemen sekolah dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Dalam pengelolaan proses belajar mengajar, sekolah diberi peluang untuk memilih strategi, metode dan teknik-teknik pembelajaran yang paling efektif sesuai kondisi sumberdaya pendidikan yang ada.
2. Dalam perencanaan dan evaluasi, sekolah diberi kewenangan merencanakan kegiatannya sesuai kebutuhannya (*school based plan*) dan mengevaluasinya sendiri.
3. Dalam pengelolaan kurikulum, sekolah hanya diperbolehkan dalam hal memperdalam, memperkaya, dan memodifikasi tetapi tidak mengurangi isi kurikulum yang berlaku secara nasional.
4. Dalam pengelolaan ketenagaan, sekolah diberi keleluasaan mulai dari analisis kebutuhan, perencanaan, rekrutmen, pengembangan, hadiah dan hukuman, kecuali menyangkut pengupahan dan rekrutmen guru pegawai negeri.
5. Dalam pengelolaan fasilitas seluruhnya menjadi kewenangan sekolah mulai dari pengadaan, pemeliharaan dan perbaikan, serta pengembangan.
6. Dalam pengelolaan keuangan, terutama pengalokasian uang sepenuhnya dilakukan sekolah. Sekolah juga diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mendatangkan penghasilan.
7. Dalam pelayanan siswa, hubungan sekolah – masyarakat dan pengelolaan iklim menjadi kewenangan sepenuhnya pihak sekolah.

Berdasarkan tujuh fungsi yang didesentralisasikan, pengembangan kurikulum 2004 telah menjadi "hak" guru untuk dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi dan kebijakan pada tingkat sekolah. Karena itu, secara bertahap pemerintah pusat terus melatih dan mensosialisasikan "instrumen" pendelegasian wewenang pusat melalui kebebasan guru dalam merumuskan silabus dan skenario pembelajaran. Kinerja guru tidak lagi di tentukan oleh kepatuhan dalam mengajarkan materi pelajaran sesuai dengan GBPP dan model-model belajar yang ditetapkan dari pusat tetapi dalam silabus dan skenario pembelajaran guru dituntut untuk lebih kreatif menyesuaikan diri dengan lingkungan sumber belajar sekolah masing-masing.

C. Menumbuhkan Keberanian Guru dalam Pengembangan Kurikulum 2004

Masalah utama sebagaimana telah dijelaskan adalah kegamangan guru dalam melaksanakan tugas yang diakibatkan kurangnya pemahaman tentang karakteristik kurikulum 2004 dan juga terjebak oleh budaya birokratik. Kedua hambatan ini menimbulkan kurangnya keberanian guru dalam mengembangkan kurikulum 2004 secara lebih inovatif. Pertanyaannya bagaimana menumbuhkan kembali keberanian guru agar mereka lebih baik dalam menjalankan tugasnya.

Dilihat dari dua hambatan di atas maka jalan yang dianggap efektif antara lain:

1. Memberi penguatan kepada guru melalui pendidikan atau pelatihan untuk memberi pemahaman yang benar tentang kurikulum 2004 dan cara-cara pengembangannya.
2. Di setiap sekolah dan dinas pendidikan kota/kabupaten harus memiliki komunitas pengembang kurikulum dan salah satu anggotanya harus berlatar belakang sarjana kurikulum. Mereka harus berperan dalam memberi obor pada setiap pengembangan kurikulum. Dengan tim pengembang kurikulum ini, secara bertahap akan memberi keyakinan kepada guru untuk berani tampil mandiri dan utuh dan sedikit demi sedikit melepaskan diri dari ketergantungan petunjuk-petunjuk teknis yang terlalu rinci dari pusat

3. Memberi penghargaan kepada guru yang melahirkan inovasi-inovasi dan atau apresiasi yang unggul dari upayanya mengembangkan kurikulum 2004. Sejak kemerdekaan republik ini, penghargaan terhadap guru yang melahirkan model-model pembelajaran dan atau inovasi pendidikan lainnya sangat kurang bahkan hampir tidak ada. Guru yang melakukan inovasi dalam pembelajaran di kelas, pada jaman sebelum Kurikulum 2004 hampir-hampir dituduh sebagai pelaksana teknis yang tidak taat aturan.

Demikianlah salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk melahirkan guru yang lebih mandiri dan kreatif.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Gaya birokratik yang telah tertanamkan pada Jaman Orde Baru telah sangat mencengkram kebebasan apresiasi guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik. Selama tiga dekade sejak diberlakukannya kurikulum 1975, 1984, dan 1994 guru secara rinci didikte dalam melaksanakan tugas. Sehingga ketika kurikulum 2004 digulirkan dengan perangkat yang berbeda dan memberi keleluasaan guru untuk melakukan apresiasi dan inovasi pembelajaran, mereka ragu dan kebingungan. Keraguannya terletak pada saat menentukan rincian kompetensi dari standar nasional, cara penilaian kompetensi, membedakan antara kompetensi yang bersifat kognitif dan aspek sikap, dan pada saat merumuskan silabus serta skenario pembelajaran. Apa yang menjadi kebingungan bukan terletak pada bagaimana cara mengerjakan tugas itu tetapi justru mereka bingung karena merasa “diambangkan” oleh pihak pemerintah pusat dengan tidak ada petunjuk yang lebih rinci.
2. Kurikulum 2004 pada dasarnya tidak lagi menonjolkan isi atau materi pelajaran, akan tetapi menempatkan pengalaman belajar untuk membentuk kemampuan sebagai arah pengembangan kurikulum, maka dalam implementasinya kurikulum lebih menekankan kepada proses belajar. Pengelolaan pembelajaran tidak lagi didesain untuk memberikan sejumlah informasi kepada siswa untuk dicatat dan dihapal, akan tetapi pengelolaan pembelajaran didesain bagaimana siswa dapat menemukan informasi yang dibutuhkan.
3. Karakteristik kurikulum 2004 dikelola dengan basis sekolah atau desentralistik. Di sinilah kunci adanya pelimpahan kewenangan kepada sekolah dan guru untuk mengembangkan kurikulum 2004. Wujud atau komponen yang diserahkan sepenuhnya kepada guru adalah dalam bentuk perumusan silabus, perencanaan pembelajaran, dan skenario pembelajaran. Dalam pengelolaan kurikulum, sekolah diperbolehkan memperdalam, memperkaya, dan memodifikasimuata kurikulum tetapi tidak mengurangi isi kurikulum yang berlaklu secara nasional.
4. Masalah utama sebagaimana telah dijelaskan adalah kegamangan guru dalam melaksanakan tugas sebagai akibat kurangnya pemahaman tentang karakteristik kurikulum 2004 dan juga terjebak oleh budaya birokratik. Dilihat dari dua hambatan di atas maka jalan yang dianggap efektif antara lain:
 - (a) Memberi penguatan kepada guru melalui pendidikan atau pelatihan untuk memberi pemahaman yang benar tentang kurikulum 2004 dan cara-cara pengembangannya.

- (b) Di setiap sekolah dan dinas pendidikan kota/kabupaten harus memiliki komunitas pengembang kurikulum dan salah satu anggotanya harus berlatar belakang sarjana kurikulum.
- (c) Memberi penghargaan kepada guru yang melahirkan inovasi-inovasi dan atau apresiasi yang unggul dari upayanya mengembangkan kurikulum 2004.

DAFTAR PUSTAKA

- Brady, Laury, (1990), *Curriculum Development*. New York: Prentice Hall.
- Depdiknas. 2002. *Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Jakarta : Depdiknas.
- Depdiknas, 2002. *Manajemen Peningkatan Mutu Bernasis Sekolah*. Depdiknas Jakarta.
- Miller and Seller, (1985), *Curriculum perspectives and practice*. New York: Longman.
- Oliva, Peter. F. 1992. *Developing Curriculum*. New York : Harper Collins Publisher.
- Romiszowski, AJ. 1981. *Designing Instructional Systems. Decision making in course Planning and curriculum design*. London: Kogan Page.
- Schubert, William 1986. *Curriculum : Perspective, Paradigma, and Possibilities*. New York : Mcmillan Publishing Co.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2000. *Pengembangan Kurikulum. Teori dan Praktek*. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.
- Taba, Hilda, 1962, *Curriculum development: theory and practice*. New York: Harcourt Brace
- Zais, R. S, (1976), *Curriculum : Principles and Foundation*. New York: harper & Row.